

Cile Sahkan UU Pernikahan Sesama Jenis

SANTIAGO (IM)- Kongres Cile mengesahkan Undang-Undang (UU) untuk melegalkan pernikahan sesama jenis pada Rabu (8/12). Keputusan ini terjadi usai negara Amerika Selatan yang konservatif ini melakukan pertempuran hukum selama satu dekade. "Hari ini adalah hari bersejarah. Negara kita telah menyetujui pernikahan sesama jenis. Satu langkah maju dalam hal keadilan, dalam hal kesetaraan, mengakui bahwa cinta adalah cinta," kata Menteri Pembangunan Sosial Cile Karla Rubilar usai pemungutan suara.

Senat Cile dan majelis rendah parlemen sama-sama memberikan suara yang mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut. RUU itu telah sebagian disetujui pada November sebelum Senat mengirimkannya kembali ke komite untuk mengklarifikasi ambiguitas.

Presiden Cile Sebastian Pinera telah mendukung RUU tersebut dan diharapkan untuk menandatangani RUU itu menjadi UU. UU akan mulai berlaku 90 hari setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara. Pemungutan

suara memuncak dari proses yang dimulai pada 2017. Ketika itu RUU pertama diperkenalkan dan didukung oleh Presiden saat itu Michelle Bachelet.

Keputusan ini menempatkan Cile untuk bergabung dengan lebih dari 20 negara secara global dengan pernikahan sesama jenis yang sah. Beberapa negara yang sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis seperti Argentina, Brasil, Kolombia, Kosta Rika, dan Uruguay di Amerika Latin.

Cile akan memilih presiden baru pada 19 Desember, dengan Pinera meninggalkan kantor kepresidenan pada Maret. Negara ini akan memilih antara calon progresif Gabriel Boric dan sosial konservatif Jose Antonio Kast, seorang Katolik yang taat. Keduanya menawarkan visi yang sangat berbeda untuk masa depan negara.

Kast tidak setuju dengan pernikahan sesama jenis. Dia mengatakan akan menandatangani RUU itu menjadi UU jika disahkan oleh Kongres selama masa jabatannya sebagai presiden. ● **gul**



IDN/ANTARA

PERINGATAN PERANG DUNIA KEDUA

Presiden AS Joe Biden mengunjungi Situs Peringatan Perang Dunia Kedua pada peringatan serangan terhadap Pearl Harbor, Hawaii, di National Mall di Washington, AS, Selasa (7/12).

Uni Eropa Ancam Rusia dengan Sanksi Baru

Uni Eropa akan menanggapi dengan tepat agresi Rusia, kata kepala Komisi Uni Eropa.

BRUSSELS (IM) - Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengancam Moskow dengan sanksi baru jika pasukan Rusia menyerang Ukraina.

Berbicara pada konferensi tahunan duta besar Uni Eropa, Rabu (8/12), von der Leyen menegaskan kembali "dukungan penuh dan tak tergoyahkan blok itu untuk Ukraina" yang

menghadapi ancaman militer besar-besaran dari Rusia di sepanjang perbatasannya.

Uni Eropa (UE) harus membela demokrasi melawan "permainan kekuatan geopolitik sinis" Rusia, kata von der Leyen, memperingatkan bahwa blok tersebut akan "merespons dengan tepat setiap agresi lebih lanjut, termasuk pelanggaran hukum

internasional atau tindakan jahat lainnya, yang dilakukan terhadap kami atau tetangga kami, termasuk Ukraina."

Dia menggarisbawahi bahwa UE akan merespons dengan "meningkatkan dan memperluas yang kuat dari rezim sanksi yang ada" dan langkah-langkah pembatasan tambahan dalam koordinasi dengan mitra internasional.

Menekankan Brussel lebih suka terlibat dalam dialog konstruktif dengan Moskow, Von der Leyen mengatakan ini saat ini tidak mungkin karena "pilihan yang disengaja dan

tindakan agresif Rusia yang terus mengganggu stabilitas keamanan di Eropa".

Setelah pertemuan para menteri luar negeri NATO di Riga pekan lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga menjanjikan pembalasan dan memberikan konsekuensi politik dan ekonomi yang serius bagi Rusia jika melakukan agresi terhadap Ukraina.

Pada 2014, Moskow mulai mendukung pasukan separatistis di Ukraina timur melawan pemerintah pusat, sebuah kebijakan yang telah dipertahankan selama tujuh tahun terakhir.

Uni Eropa telah menerapkan langkah-langkah pembatasan dalam menanggapi krisis Ukraina sejak 2014.

Saat ini, 185 orang dan 48 entitas berada dalam daftar hitam blok tersebut karena melanggar integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina. Sanksi ekonomi terpisah pada sektor keuangan, energi, dan pertahanan Rusia juga diberlakukan, di mana blok tersebut mengatakan Moskow enggan sepenuhnya menerapkan Perjanjian Minsk yang bertujuan untuk membangun perdamaian di Ukraina Timur. ● **tom**

Kim Jong-un Perintahkan Tentara Korut Setia pada Partai Buruh

PYONGYANG (IM) - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memerintahkan sistem pendidikan militer harus melipatgandakan upaya untuk menghasilkan tentara yang setia sepenuhnya kepada Partai Buruh yang berkuasa.

Kantor berita pemerintah, KCNA, yang dikutip Reuters, Rabu (8/12), melaporkan bahwa Kim

Jong-un membuat perintah itu pada Konferensi Kedelapan Pendidikan Militer Tentara Rakyat Korea yang diadakan di Pyongyang selama akhir pekan.

"Dia menggarisbawahi perlunya mempersiapkan semua pendidik militer untuk menjadi tentara sejati yang sangat setia pada ide dan kepemimpinan partai dan untuk mengatur dan memberikan pendidikan militer, dipandu secara ketat oleh ide,

kebijakan, dan metode partai untuk mengangkat semua taruna menjadi perwira komandan yang tetap setia sepenuhnya kepada Komite Sentral Partai," tulis KCNA.

Konferensi itu, lanjut KCNA, juga meninjau beberapa penyimpangan yang terlihat dalam pendidikan militer karena kurangnya kesadaran ideologis.

Itu adalah yang terbaru dari

serangkaian acara dan kampanye hubungan masyarakat yang berfokus pada peningkatan loyalitas politik saat Kim Jong-un bersiap untuk menandai 10 tahun berkuasa bulan ini.

Bulan lalu, Korea Utara mengadakan konferensi di mana Kim Jong-un mengumumkan rencana untuk memperluas sistem penghargaan loyalitas, dan media pemerintah telah menyiarkan serang-

kaian cerita tentang pemuda bandel yang menemukan penubusan melalui kerja paksa fisik untuk partai.

Negara ini telah bergulat dengan krisis ekonomi yang semakin parah yang disebabkan oleh pengurangan pembatasan anti-pandemi yang dipaksakan sendiri, bencana alam, dan sanksi internasional atas program senjata nuklirnya. ● **ans**

Korsel Laporkan 7.000 Kasus Baru Covid-19

SEOUL (IM) - Korea Selatan (Korsel) melaporkan lebih dari 7.000 kasus baru Covid-19 pada Rabu (8/12). Ini pertama kalinya Negeri Ginseng mencatat peningkatan kasus harian sebanyak itu sejak menghadapi pandemi.

Peningkatan kasus tersebut menempatkan kapasitas rumah sakit di bawah tekanan. "Di wilayah ibu kota, di mana 80 persen dari total kasus dilaporkan, kami terus menambah tempat tidur rumah sakit dengan kerja sama aktif dari komunitas medis. Akan tetapi masih sulit mengejar laju peningkatan kasus virus," kata Perdana Menteri Korsel Kim Boo-kyum dalam rapat penanganan Covid-19, dilaporkan kantor berita Korsel, Yonhap.

Jumlah rata-rata harian kasus Covid-19 di Korsel tetap di angka 5.000 selama sepekan terakhir. Kim mengatakan pemerintah akan meningkatkan sistem perawatan kesehatan di rumah untuk mengamankan keberlanjutan kemampuan respons medis negara tersebut. Hal itu mencakup langkah-langkah memperluas tenaga kerja dan meningkatkan manajemen medis.

Kim mengungkapkan obat oral Covid-19 akan diberikan kepada pasien perawatan rumah yang serius mulai awal 2022. Masa karantina wajib bagi anggota keluarga atau mereka yang hidup dengan pasien Covid-19 yang memilih perawatan mandiri di rumah akan dikurangi, dari sepuluh menjadi tujuh hari. Mereka pun akan diberikan hibah bantuan tambahan tergantung pada jumlah orang per rumah tangga.

Terkait penemuan 36 kasus Omicron di Korsel, Kim menyerukan penyelidikan epidemiologis ekstensif dan pengujian cepat. Hal itu karena

Omicron diyakini lebih menular dibanding varian lainnya.

Guna mengantisipasi potensi penyebaran lebih luas, aturan jarak sosial di Korsel bakal diperketat. Mulai Senin pekan depan hingga 2 Januari, jumlah maksimum orang pada pertemuan pribadi akan dikurangi menjadi enam di wilayah Seoul dan delapan di daerah lainnya. Saat ini pertemuan diizinkan dihadiri masing-masing 10 dan 12 orang.

Pengunjung bisnis berisiko tinggi, termasuk sauna, pub, dan pusat kebugaran, harus menunjukkan "kartu karantina" atau dikenal juga sebagai "kartu vaksin". Hal itu untuk menunjukkan mereka telah divaksinasi atau memiliki hasil tes negatif Covid-19.

"Ada banyak kekhawatiran bahwa pedagang kecil dan wiraswasta akan menjadi lebih cemas karena aturan karantina yang lebih ketat yang dimulai dari pekan ini. Namun kami tahu dari pengalaman kami sebelumnya jika pencegahan virus gagal, maka kehidupan orang juga akan goyah," kata Kim.

Kim mendesak warga lansia mengambil dosis vaksin booster. Sementara kalangan pemuda diminta menuntaskan proses vaksinasi dua dosis mereka. "Orang berusia 60 tahun atau lebih menyumbang 35 persen dari total kasus dan 84 persen pasien virus yang sakit kritis. Untuk meningkatkan vaksinasi siswa, pihak berwenang harus menyiapkan berbagai langkah dukungan, termasuk program vaksinasi di sekolah," ujarnya.

Sejauh ini Korsel sudah mencatatkan 482 ribu kasus Covid-19 dengan korban meninggal mencapai 3.957 jiwa. ● **gul**

Swiss Kerahkan Tentara Tangani Lonjakan Covid-19

ZURICH (IM) - Swiss kembali mengerahkan 2.500 tentara untuk membantu pemerintah daerah menangani pandemi virus corona, demikian dinyatakan pemerintah, Rabu (8/12). Pengerahan para personel militer itu dilakukan untuk membantu sistem layanan kesehatan pada saat kasus Covid-19 melonjak.

Pemerintah pusat akan membuka kesempatan bagi pemerintah-pemerintah daerah untuk mengajukan permintaan bantuan melayani pasien, menyediakan kendaraan untuk mengangkut pasien, serta membantu vaksinasi jika tenaga pertahanan sipil, pemadam

kebakaran, dan layanan swasta tidak mencukupi. Pemerintah mengatakan pihaknya akan meminta parlemen untuk menyetujui langkah itu, yang akan dijalankan hingga 31 Maret.

Swiss tahun lalu juga mengerahkan militer sebanyak dua kali untuk membantu penanganan pandemi. Swiss dan negara tetangganya, Liechtenstein, telah melaporkan lebih dari satu juta kasus terkonfirmasi Covid-19 serta hampir 11.300 kematian akibat penyakit itu sejak pandemi mulai muncul tahun lalu.

Kasus virus corona itu kembali merebak hingga membuat rumah-rumah sakit ke-

walahan. Hampir 79 persen unit layanan intensif rumah sakit (ICU) saat ini terisi. Sedikitnya 30 persen dari angka itu adalah pasien Covid-19.

Sementara itu, pemerintah berupaya tetap membuka aktivitas ekonomi di tengah keadaan yang disebutnya "kritis". Pekan lalu, pemerintah Swiss memperketat kewajiban pada warga untuk mengenakan masker serta menunjukkan sertifikat vaksinasi atau bukti jika seseorang sudah sembuh dari Covid-19.

Penduduk Swiss yang sudah divaksin lengkap baru mencapai 66 persen, yakni tiga dari empat orang berusia di atas 12 tahun. ● **tom**



IDN/ANTARA

HUJAN SALJU LEBAT DI MOSKOW - RUSIA
Pekerja komunal membangun pohon Natal selama hujan salju lebat di Moskow, Rusia, Selasa (7/12).

Penjualan Senjata Dunia Capai USD531 Miliar pada 2020

ANKARA (IM) - Setelah selama enam tahun mengalami pertumbuhan, penjualan senjata yang dilakukan 100 produsen top dunia mencapai nilai USD531 miliar pada 2020. Dari total angka, perusahaan-perusahaan asal AS mendominasi 54 persen di antaranya, sebut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) pada Senin.

Penjualan senjata dan layanan militer oleh 100 perusahaan industri terbesar meningkat 1,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lapor SIPRI. Sebanyak 41 perusahaan senjata di AS membukukan nilai USD285 miliar dengan kenaikan 1,9 persen tahun-ke-tahun.

Sejak 2018, lima perusahaan teratas dalam peringkat semuanya berbasis di AS, SIPRI menekankan. Lima perusahaan China berkontribusi sebanyak 13 persen dari total penjualan senjata, naik 1,5 persen menjadi USD66,8

miliar pada periode yang sama.

Perusahaan-perusahaan Inggris merupakan negara terbesar ketiga tahun ini yang menyumbang USD37,5 miliar penjualan senjata pada tahun 2020, naik 6,2 persen dibandingkan 2019. Sementara penjualan senjata perusahaan Rusia turun 6,5 persen secara tahunan, atau mencapai USD26,4 miliar tahun lalu.

"Ini menandai kelanjutan dari tren penurunan yang diamati sejak 2017, ketika penjualan senjata oleh perusahaan Rusia di Top 100 cukup tinggi saat itu," tulis SIPRI.

Sementara itu, Aselsan adalah satu-satunya perusahaan industri pertahanan Turki, berada di peringkat ke-51, dalam 100 besar perusahaan yang melakukan perdagangan senjata. Aselsan membukukan penjualan senjata senilai USD2,2 miliar pada tahun 2020, melonjak 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. ● **gul**



IDN/ANTARA

LOKASI LEDAKAN DI BASRA - IRAK
Pasukan keamanan Irak memeriksa lokasi ledakan di Basra, Irak, Selasa (7/12).